UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Digitalisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
ENDAH WULANDARI, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M. Sc
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

STUDI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Endah Wulandari
24/547236/PMU/11997

Penelitian ini menganalisis implementasi inovasi kebijakan digital berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat ASN di Kabupaten Barito Selatan. Kebijakan perubahan periodisasi dari dua menjadi dua belas periode menuntut peningkatan kapasitas administrasi dan digitalisasi layanan kepegawaian agar proses kenaikan pangkat lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, implementasi kebijakan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan kompetensi ASN masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja implementasi inovasi kebijakan digital serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. State of the art penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi kebijakan digital kenaikan pangkat ASN di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, yang masih jarang dibahas dalam studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada kota besar atau instansi pusat. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, teori institusional Scott, serta konsep transformasi digital sektor publik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen pada BKPSDM serta ASN pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi kebijakan digital di Kabupaten Barito Selatan cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kenaikan pangkat melalui penggunaan Google Drive, tanda tangan elektronik, dan aplikasi MYASN. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi, motivasi ASN, dan komitmen organisasi, sedangkan hambatan utama berupa keterbatasan akses internet, kompetensi digital ASN yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan birokrasi.

Kata kunci**:** Implementasi Kebijakan, Transformasi Digital, Kenaikan Pangkat ASN, Inovasi Kebijakan Digital, Kabupaten Barito Selatan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Studi Kinerja Implementasi Kebijakan Digitalisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
ENDAH WULANDARI, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M. Sc
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

A STUDY OF THE PERFORMANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITALIZATION POLICY FOR CIVIL SERVANT PROMOTION

Endah Wulandari
24/547236/PMU/11997

This study analyzes the implementation of digital policy innovation based on the National Civil Service Agency (BKN) Regulation Number 4 of 2025 concerning the periodization of civil servant promotions in Barito Selatan Regency. The policy, which changed the promotion periodization from two periods to twelve periods annually, requires increased administrative capacity and the digitalization of personnel services to make the promotion process faster, more transparent, and more efficient. However, the implementation of this policy in regions with limited digital infrastructure and varying levels of civil servants' digital competence still faces numerous challenges. This study aims to analyze the performance of digital policy innovation implementation and identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The state of the art of this study lies in its focus on the implementation of digital promotion policies for civil servants in regions with limited digital infrastructure, a topic that has rarely been discussed in previous studies, which generally focused on large cities or central government institutions. The study employs the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, Scott's institutional theory, and the concept of public sector digital transformation. A qualitative approach with a case study design was used. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and document studies involving the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency (BKPSDM) and civil servants as service users. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of digital policy innovation in Barito Selatan Regency has been relatively effective in improving the efficiency of promotion services through the use of Google Drive, electronic signatures, and the MYASN application. The main supporting factors include regulatory support, civil servants' motivation, and organizational commitment, while the main obstacles consist of limited internet access, uneven digital competence among civil servants, and resistance to bureaucratic change.

Keywords: Policy Implementation, Digital Transformation, Civil Servant Promotion, Digital Policy Innovation, Barito Selatan Regency